

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi dunia yang memberikan keterbukaan dalam investasi membuat banyak perusahaan membuka gerbang bagi investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut guna mengembangkan sayap serta memperkokoh pijakan perusahaan dalam persaingan ekonomi global. Di Indonesia standar akuntansi keuangan berbasis IFRS mulai diterapkan sejak tahun 2012. Sebelum tahun 2012 penerapan dini standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS dianjurkan bagi perusahaan yang mau menerapkan. Oleh karena itu sebelum tahun 2012 bagi perusahaan yang telah mampu menerapkan IFRS diperbolehkan untuk menggunakan standar akuntansi internasional tersebut.

Perusahaan yang menerapkan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS maka diwajibkan untuk melakukan pengungkapan penuh (*full disclosure*). Pengungkapan dilakukan dengan membuat laporan keuangan atau laporan tahunan (*Annual Report*). Pengungkapan dalam annual report merupakan salah satu isu penting di dunia pasar modal. *Annual report* merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama oleh pemegang saham dan investor untuk menentukan tujuan mereka (Belkaoui dalam Pitasari, 2014).

Tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Dengan melihatnya tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan maka penerapan *corporate governace* merupakan salah satu elemen kunci dalam

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni *et al* dalam Rupilu, 2011).

Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan (Adina dan Ion dalam Pitasari, 2014).

Laporan tahunan merupakan sumber informasi yang berguna bagi investor untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan juga sebagai standar pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang harus dikelola dan telah dipercayakan kepada perusahaan tersebut (Diyanti, 2012). Informasi yang disajikan dalam laporan tahunan harus dapat dipahami, dipercaya, relevan dan transparan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investor, kreditor dan pengguna informasi lainnya. Hal tersebut disebabkan kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang mengandung risiko dan ketidak pastian, oleh karena itu informasi yang disajikan perusahaan diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko dan

memadai diperlukan untuk mempermudah informasi dipahami oleh para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut (Diyanti, 2012). Struktur *corporate governance* merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan (Prawinandi dkk., 2012).

Hasil penelitian Fitriany dalam Pabrianto 2014 menemukan bahwa rata-rata indeks pengungkapan di Indonesia sebesar 59,85% dimana penelitian tersebut menghitung indeks pengungkapan laporan tahunan perusahaan manufaktur pada tahun 1999 dengan berdasarkan peraturan BAPEPAM tentang pengungkapan wajib sebanyak 77 item. Junaid dalam Pabrianto 2014 menemukan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM pada tahun 2002-2004 sekitar 91,79% dengan indeks pengungkapan terendah sebesar 84%. Survey yang dilakukan oleh *World Bank* pada tahun 2007 menunjukkan Indonesia berada pada posisi 135 dari 175 negara, turun 4 peringkat dibanding tahun lalu. Hal ini bisa disimpulkan bahwa penerapan *governance* yang baik di Indonesia sudah ada kemajuan, namun negara-negara lain nampak berlari lebih cepat dibandingkan Indonesia, karena mereka yakin dengan upaya demikian, mereka unggul dalam menarik investasi.

Beberapa tahun terakhir, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia. *Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2006) mempublikasikan sebuah survei yang dilakukan oleh *Price water house Coopers* pada tahun 1999 terhadap investor internasional di

terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi (Utami dkk., 2012).

Adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang, terutama pada laporan laba rugi, misalnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga terjadi pengelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul, 2002 dalam Utami dkk., 2012). Manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*.

Kasus PT Kimia Farma, Tbk ini mengidentifikasi pentingnya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi internasional yaitu IFRS. Semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009).

Lins dan Warnock dalam Utami (2012) menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme untuk perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan *corporate governance*, yaitu mekanisme internal perusahaan dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal diprosikan dengan kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komisaris independen, sedangkan mekanisme eksternal diprosikan

dapat menjamin tingkat pengungkapan yang lebih tinggi sehingga diperlukan sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk memonitor manajer dan mengelola perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan informasi yang memadai (Akhtaruddin *et al.*, dalam Prawinandi, 2012).

Corporate governance mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan (Mintara, 2008), dimana hasil kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan perusahaan. Inti *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris (FCGI, 2001), sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada di bawah dewan komisaris yaitu komite audit. Struktur *corporate governance* tersebut antara lain jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita dan jumlah anggota komite audit (Prawinandi dkk, 2012). Laporan keuangan diyakini dapat mencerminkan prospek perusahaan. Hal ini sangat umum dilakukan mengingat setiap investor tentunya tidak ingin menderita kerugian akibat salah dalam mengambil keputusan karena kurang lengkapnya informasi yang di ungkapkan pada laporan keuangan di sebuah perusahaan *go public*.

Penelitian terkait tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, Prawinandi dkk (2012) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan jasa di Indonesia dalam mengungkapkan rerata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

komisaris independen dan jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap konvergensi IFRS. Kedua, Pitasari (2014) dimana perusahaan yang telah memenuhi peraturan mengenai jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris belum mampu untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Ketiga, Sari (2013) mengungkapkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang komisaris utama, Jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota dewan direksi, profitabilitas, leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Keempat, Pabrianto (2014) mengungkapkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan latar belakang komisaris utama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Pitasari yang dilakukan pada tahun 2014 dimana penelitian menggunakan variabel *corporate governance*. Indikator variabel *corporate governance* tersebut adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, pada perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2010-2012.

Perbedaannya peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti tahun penelitian yaitu tahun 2012-2013 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menambahkan Variabel Independen penelitian yaitu latar

penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan terutama berfokus pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan. Penelitian ini berfokus pada laporan laba rugi komprehensif karena laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang selalu diperhatikan oleh *stakeholders* dalam *annual report* sebagai pedoman mereka dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan laba rugi komprehensif juga menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode pelaporan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana struktur *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan konvergensi IFRS yang berfokus pada laporan laba rugi komprehensif dan struktur *corporate governance*. Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris, proporsi komisaris wanita, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit.

mengetahui: bagaimana struktur *corporate governace* dapat mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif?
3. Apakah latar belakang komisaris utama berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif?
4. Apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif?
5. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif?
6. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif?

mandatory disclosure konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif.
2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif.
3. Untuk menganalisis pengaruh latar belakang komisaris utama berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif.
4. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif.
5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif.
6. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif.

terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada laporan laba komperhensif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan manufaktur yang telah *go public*, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme *corporate governace* kaitannya dengan tingkat kepatuhan pengungkapan.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. Bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian dapat digunakan sebagai pendorong untuk menetapkan kebijakan ataupun standar pengungkapan wajib yang lebih baik.
4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur *corporate governace* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.